

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu

Juwandariah Jubir

Universitas Muhammadiyah Palopo

juwanjubir04@gmail.com

Muhammad Ikbal

Universitas Muhammadiyah Palopo

muhammadikbal@umpalopo.ac.id

Rahmad Solling Hamid

Universitas Muhammadiyah Palopo

rahmadshamid@umpalopo.ac.id

Goso Goso

Universitas Muhammadiyah Palopo

goso@umpalopo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu. Pengeluaran pemerintah diproksikan menggunakan jumlah total belanja tidak langsung dan belanja langsung pemerintah daerah. Investasi swasta diproksikan menggunakan jumlah total realisasi PMA dan PMDN di Kabupaten Luwu. Pada penelitian ini teori dasar yang digunakan merupakan teori pertumbuhan Keynes (Harrod-Domar) dengan pertimbangan kemampuan untuk menunjukkan pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha, data pengeluaran pemerintah menurut jenis belanjanya yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Luwu. Serta data investasi swasta dari NSWI BKPM Kabupaten Luwu berupa data *time series* mulai tahun 2011-2020. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS versi 23. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien determinasi variabel independen sebesar 0,884 atau 88,4% variabel independen mempengaruhi variabel dependent dan 11,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Secara parsial variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu, sedangkan variabel investasi swasta secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu.

Kata Kunci *Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, Pertumbuhan Ekonomi*

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan penggunaan teknologi. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur seberapa besar output yang dihasilkan dalam suatu perekonomian, namun memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian suatu daerah dalam kurun waktu tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintah daerah biasanya diindikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut adalah data perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu.

Tabel 1. Perkembangan pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu

Tahun	PDRB (Rp)	PDRB (%)
2011	5.528.31	7,89
2012	5.915.10	7,00
2013	6.372,70	7,74
2014	6.934.02	8,81
2015	7.437,42	7,26
2016	8.023.37	7,88
2017	8.567.87	6,79
2018	9.155.58	6,86
2019	9.728.97	6,26
2020	9.855.91	1,30

Sumber: BPS Kabupaten Luwu 2020

Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan PDRB harga konstan tahun 2010, nilai PDRB Kabupaten Luwu pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di setiap lapangan usaha yang telah terbebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Luwu atas dasar harga konstan 2010, mengalami peningkatan, dari 9,16 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 9,73 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Luwu mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 6,26 persen, lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang tidak dipengaruhi inflasi (Badan Pusat Statistik, 2020)

Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang diharap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan mengoptimalkan pengeluaran (*share*) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Secara *riil* pengeluaran pemerintah meningkat sejalan dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam hal pembangunan peran pemerintah dapat dikaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat daerah. Berikut data realisasi belanja pemerintah Kabupaten Luwu Menurut Jenis Belanja.

Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Luwu Menurut Jenis Belanja

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total
2011	363.551.05	306.197.36	669.748.41
2012	395.692.82	261.467.48	657.160.30
2013	449.107.98	338.465.92	787.573.90
2014	492.272.86	425.085.97	917.358.83
2015	602.813.08	542.412.95	1.145.226,03
2016	778.188.63	744.698.04	1.522.886.67
2017	729.850.32	593.774.92	1.323.625.24
2018	788.653.67	542.914.94	1.331.568.61
2019	819.688.00	657.299.99	1.476.987.99
2020	789.208.90	593.686.80	1.382.895.70

Sumber: BPS Kabupaten Luwu 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 11,19% per tahun. Pertumbuhan belanja daerah terbesar bersumber dari belanja tidak langsung sebesar 12,49% per tahun sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja langsung sebesar 10,14% sebagaimana ditunjukkan dalam proporsi realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja (Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kab Luwu Thn 2019-2024.Pdf, 2019)

Tumbuhnya perekonomian daerah merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan daerah. Investasi Swasta diperlukan karena dalam melakukan pembangunan ekonomi dibutuhkan biaya yang cukup besar yang salah satunya diperoleh dari investasi swasta baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk yang meningkat di suatu negara/wilayah (buana). Berikut perkembangan investasi di Kabupaten Luwu.

Tabel 3. Jumlah Investasi PMA/PMDN Tahun 2011-2020

Tahun	PMA		PMDN		Total Investasi
	Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Proyek	Nilai Investasi (Rp)	
2011	2	62.741,0	1	0,0	62.741
2012	2	415.514,9	3	60.266,0	475.780,9
2013	5	30.700,5	3	30.266,1	60.966,6
2014	2	155.660,2	4	59.945,2	215.605,4
2015	8	72.251,4	7	0,0	72.251,4
2016	6	33.810,7	9	520.065,8	553.876,5
2017	4	29.145,7	6	408.504,4	437.650,1
2018	3	4.899,1	6	32.904,0	37.803,1
2019	5	2.601,1	10	59.435,0	62.036,1
2020	7	23.200,4	48	23.540,6	46.741

Sumber: National Single Window for Investment (NSWI) BKPM

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Realisasi investasi di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi selama periode 2011-2020. Pada tahun 2011 nilai investasi mencapai Rp 62.741 miliar dengan jumlah investor 3 perusahaan. Sedangkan pada tahun 2020 investasi yang direalisasikan hanya mencapai Rp 46.741 miliar. Mengingat potensi Kabupaten Luwu yang sangat besar untuk investasi di sektor industri berskala besar, maka upaya-upaya untuk menciptakan iklim investasi yang baik di Kabupaten Luwu perlu dikedepankan.

Berdasarkan beberapa data yang diperoleh terkait kondisi perekonomian Kabupaten Luwu dengan jumlah penduduk sebesar 362.027 jiwa selama tahun 2019 atau sekitar

4,09 persen dari jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,26 persen. Meskipun demikian jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 46,18 ribu jiwa atau 12,76% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Luwu, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu, oleh sebab itu pemerintah perlu mengambil kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat memacu peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya menghasilkan perbedaan hasil antar penelitian yang dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Maharani dan Sri Isnawati (2014) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya otonomi daerah pengeluaran pemerintah dan investasi swasta memiliki peran besar dalam perkembangan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Buana., et al (2018), Haryanto (2013), dan Heri Suparno (2014). Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh P. Alan Jirang et,al (2015), Kurniawan., et al (2017), dan Hukubun., et al (2014) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi artinya peningkatan atau penurunan pengeluaran pemerintah dan investasi swasta tidak dapat menaikkan atau menurunkan pertumbuhan ekonomi.

II. LANDASAN TEORI

1. Teori Pertumbuhan Keynesian (Harrod-Domar)

Keynes berpendapat bahwa sistem *Laissez Faire* murni tidak bisa dipertahankan. Pada tingkat makro, pemerintah harus secara aktif dan sadar mengendalikan perekonomian ke arah posisi “*Full Employment*”. Situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat (output yang dihasilkan) dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi “kekurangan produksi”. Pada periode berikutnya output akan naik atau harga akan naik, atau keduanya terjadi bersama-sama.

Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat dengan demikian, dapat mempengaruhi situasi makro agar mendekati posisi *Full Employment*. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Harrod-Domar sebagai pelengkap dari analisis yang dilakukan oleh Keynes. Dalam analisis yang dilakukan oleh Keynes menyangkut persoalan ekonomi jangka pendek, sedangkan dalam analisis Harrod-Domar merupakan analisis ekonomi jangka panjang yang menyatakan bahwa:

1. Dalam jangka panjang pertambahan pengeluaran agregat yang berkepanjangan perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi
2. Pertumbuhan ekonomi yang teguh hanya mungkin dicapai apabila $I + G + (X - M)$ terus menerus bertambah dengan tingkat yang tinggi.

2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk

nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah menstabilkan harga tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah merupakan komponen penting bagi pembangunan ekonomi, jika suatu perekonomian peran sektor swasta menurun dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, maka pemerintah dapat memacu pembangunan ekonomi dengan cara meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah. Kenaikan pengeluaran pemerintah dapat merangsang perkembangan dari sektor-sektor lain.

Belanja adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode tertentu. Belanja daerah menurut kelompok belanja berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas:

- a. **Belanja tak langsung** adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan tak terduga.
- b. **Belanja langsung** adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

3. Investasi Swasta

Menurut teori klasik investasi merupakan suatu pengeluaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan produksi. Jadi investasi merupakan pengeluaran yang akan menambah jumlah alat-alat produksi dalam masyarakat sehingga menyebabkan PDRB meningkat. Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penyerapan tenaga kerja dalam meningkatkan output. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal maka dapat meningkatkan PDRB.

Investasi merupakan penanaman modal atau capital yang bertujuan untuk menambah barang-barang atau alat produksi dalam jangka panjang, dengan pertimbangan dialokasikan pada sektor-sektor yang menguntungkan dan aman dari resiko kerugian. Masalah investasi adalah suatu masalah yang langsung berhubungan dengan besarnya pengharapan akan pendapatan yang akan diperoleh dari barang modal di masa yang akan datang. Penghargaan akan pendapatan merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan besarnya investasi.

3.1 Faktor Faktor Penentu Tingkat Investasi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi antara lain :

1. Tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected rate of return*) kemampuan perusahaan menentukan tingkat investasi yang diharapkan, sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan. Kondisi internal adalah factor yang berada dibawah kontrol perusahaan, sedangkan kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi terutama adalah perkiraan tentang produksi dan pertumbuhan ekonomi domestic dan internasional.

2. Biaya investasi yang paling menentukan adalah tingkat bunga pinjaman. Semakin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi semakin mahal. Akibatnya minat investasi semakin menurun.

3. *Marginal efficiency of capital* (MEC), tingkat bunga dan *marginal efficiency investment* (MEI) sebagai sebuah keputusan yang rasional.

Berdasarkan jenis investasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan oleh pihak swasta bertujuan untuk mencari keuntungan serta mendorong peningkatan pendapatan.

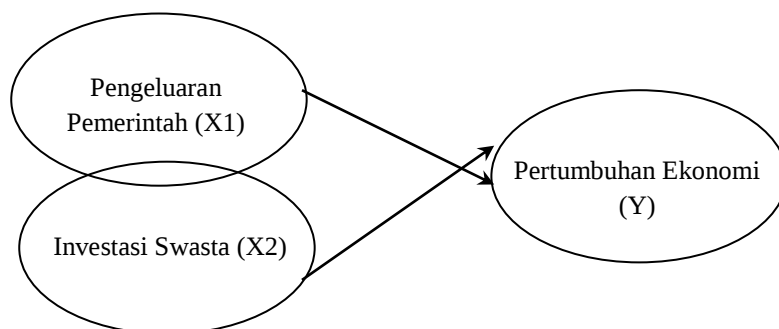
4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan dengan pendapatan nasional berbagai tahun yang dihitung berdasarkan harga konstan. Jadi perubahan dalam nilai pendapatan hanya semata-mata disebabkan oleh suatu perubahan dalam suatu tingkat kegiatan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dihitung melalui indikator perkembangan PDRB dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan baik apabila tingkat kegiatan ekonomi masa sekarang lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintah daerah diindikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui PDRB. Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) merupakan nilai tambah bruto dari barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestic suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Pertumbuhan ekonomi dapat mencapai sasaran sesuai dengan tujuan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian perlu ada strategi pembangunan yang tepat. Oleh karena itu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) yang mengukur pendapatan perkapita masyarakat dalam perekonomian.

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah dan investasi swasta dijelaskan oleh teori Keynes yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur pada peningkatan pendapatan nasional, diperlukan peningkatan permintaan konsumsi, pengeluaran pemerintah, permintaan investasi, serta permintaan ekspor dan impor. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

III. METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder time series dengan rentan waktu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, berupa data pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan investasi swasta. Berikut definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Variabel	Indikator	Satuan	Skala Pengukuran
Pengeluaran Pemerintah (X1)	Pengeluaran pemerintah merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	- Belanja Langsung - Belanja Tidak Langsung	Rupiah	Skala Rasio
Investasi Swasta (X2)	Investasi merupakan kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian.	- Penanaman Modal Asing (PMA) - Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rupiah	Skala Rasio
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh peningkatan output produksi masyarakat.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha	Rupiah	Skala Rasio

IV. HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Berikut hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Text* dengan bantuan program SPSS versi 23.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.00
	Std. Deviation	53335.948
Most Extreme Differences	Absolute	.164
	Positive	.140
	Negative	-.164
Test Statistic		.164
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: SPSS 23, diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas dapat dijabarkan bahwa nilai probabilitas *Asymp.Sig* (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test* dalam hal ini data berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	328347.107	71689.881		4.580	.003		
pengeluaran pemerintah	.004	.001	.925	7.165	.000	.996	1.004
investasi swasta	-.018	.010	-.239	1.849	.107	.996	1.004

Sumber: SPSS 23, diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gangguan multikolinieritas, hal ini sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dengan melihat nilai *Tolerance* dan VIF. Berdasarkan outputnya nilai tolerance masing-masing variabel Pengeluaran Pemerintah (X1) dan Investasi Swasta (X2) sebesar $0,996 > 0,10$. Sementara nilai VIF untuk masing-masing variabel adalah $1,004 < 0,10$ yang artinya bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.940 ^a	.884	.851	60477.280	1.764

Sumber: SPSS 23, diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,764. Nilai tabel dengan menggunakan alpha 5% atau 0,05 dengan jumlah sampel sebanyak 10 dan jumlah variabel independen 2 dan pada tabel Durbin-Watson diperoleh nilai dL = 0,6972 dan dU = 1,6413, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	26748.257	32034.187		.835	.431
pengeluaran pemerintah	5.869E-5	.000	.075	.218	.833
investasi swasta	.005	.004	.412	1.202	.268

Sumber: SPSS 23, diolah (2021)

Berdasarkan hasil output diatas diketahui nilai signifikan (sig) variabel pengeluaran pemerintah (X1) adalah $0,833 > 0,05$ dan variabel investasi swasta (X2) adalah $0,268 > 0,05$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji glejser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode regresi linier berganda, hal ini dilakukan karena peneliti berusaha menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 23, maka hasil persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Coefficients					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
1 (Constant)	328347.107	71689.881		4.580	.003
pengeluaran pemerintah	.004	.001	.925	7.165	.000
investasi swasta	-.018	.010	-.239	-1.849	.107

Sumber: Hasil olah Data SPSS 2021

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas maka model untuk menguji Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi selama periode 2011-2020 adalah sebagai berikut:

$$Y = 328347,107 + 0,004 - 0,018 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda diatas adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) diperoleh sebesar 328347,107 artinya adalah variabel Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu dengan nilai konstan atau sama dengan nol (0), maka Pertumbuhan Ekonomi nilainya sebesar 328347,107 (dalam persen).
2. Nilai koefisien regresi variabel Pengeluaran Pemerintah (X1) sebesar 0,004 artinya bahwa setiap kenaikan satu persen, maka akan diikuti kenaikan jumlah Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,004 atau 0,04% dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel Investasi Swasta (X2) sebesar -0,018 artinya bahwa setiap kenaikan satu persen, maka akan diikuti dengan penurunan jumlah Pertumbuhan Ekonomi sebesar -0,018 atau 1,8% dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

Hasil Uji Hipotesis

Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen menerangkan variabel dependen yang dilihat melalui nilai R Square. Berikut hasil pengolahan data menggunakan program SPSS versi 23 adalah sebagai berikut :

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.940 ^a	.884	.851	60477.280

Sumber: Hasil olah data SPSS 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *R Square* (R^2) adalah 0,884 artinya bahwa 88,4% variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel pengeluaran pemerintah (X1) dan variabel investasi swasta (X2). Sedangkan sisanya sebesar 11,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Hasil Uji Parsial (t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil pengolahan data dengan SPSS versi 23:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	328347.107	71689.881		4.580	.003
pengeluaran pemerintah	.004	.001	.925	7.165	.000
investasi swasta	-.018	.010	-.239	-1.849	.107

Sumber: Hasil olah data SPSS 2021

Berdasarkan hasil output diatas maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Uji hipotesis Pengeluaran Pemerintah (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu. Berdasarkan output tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai t_{Hitung} sebesar 7,165 dan nilai t_{Tabel} sebesar 1,894 sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 artinya bahwa nilai $t_{Hitung} > t_{Tabel}$ dan signifikansi $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu.
2. Uji hipotesis Investasi Swasta (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu. Berdasarkan output tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai t_{Hitung} sebesar -1,849 dan nilai t_{Tabel} sebesar 1,894 sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,107 artinya bahwa nilai $t_{Hitung} < t_{Tabel}$ dan signifikansi $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Investasi Swasta secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu.

Uji Simultan (F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen dengan taraf signifikan 5% dengan ketentuan jika nilai $sig < 0,05$ maka variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	194734381307.337	2	97367190653.669	26.621	.001 ^b
Residual	25602510051.163	7	3657501435.880		
Total	220336891358.500	9			

Sumber: Hasil olah data SPSS 2021

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai F_{Hitung} sebesar 26,621 dan F_{Tabel} pada tingkat signifikan 5% sebesar 4,74 sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,001, maka dapat disimpulkan bahwa nilai $F_{Hitung} > F_{Tabel}$ dan nilai $sig < 0,05$ sehingga variabel Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu.

Pembahasan Hasil

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (X1) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) Di Kabupaten Luwu

Dari hasil pengujian statistik secara parsial yang telah dilakukan antara variabel Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan bahwa nilai t_{Hitung} 7,165 $>$ nilai t_{Tabel} 1,894 sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 $<$ 0,05 serta

nilai koefisien regresinya sebesar 0,004 yang artinya setiap kenaikan 1% pengeluaran Pemerintah maka akan diikuti dengan kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,004 atau 0,4% sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu. Total realisasi belanja daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 11,19% per tahun, jika melihat persentasenya tingkat pengeluaran pemerintah masih terbilang rendah. Hal ini dapat dipahami mengingat dampak pandemi menekan belanja pemerintah untuk pegawai dan barang. *Refocusing* dan alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 berdampak pada penurunan penyerapan belanja barang tersebut. Pandemi COVID-19 menyebabkan penerapan *work from home* dan pembatasan perjalanan dinas sehingga biaya operasional kantor dan perjalanan dinas menurun penyerapannya. Sedangkan belanja bansos, hibah, dan bantuan keuangan meningkat seiring tingginya stimulus dampak pandemic COVID-19. Mengingat pentingnya peran pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka dari itu mengharuskan pemerintah daerah mengambil kebijakan anggaran defisit, sebagai langkah ekspansi fiskal guna menjaga *trend* pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Indriatno Kurniawan (2017) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki koefisien jalur sebesar 0,363 berhubungan dan mempengaruhi secara positif, artinya bahwa setiap kenaikan 1% Pengeluaran Pemerintah akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,363%. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pambudy & Syairozi (2019), Siti Aminah (2016), Maharani & Isnawati (2014), Irawati Bawinti (2018) dan Danawati et.al (2016).

Pengaruh Investasi Swasta (X2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) Di Kabupaten Luwu

Hasil pengujian secara parsial yang telah dilakukan antar variabel investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai sig sebesar $0,107 < 0,05$ dan koefisien dari variabel investasi swasta adalah -0,18, artinya bahwa investasi swasta tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu, jika investasi mengalami kenaikan sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 0,18%.

Investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu dikarenakan pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Dari data realisasi PMA di Provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan IV 2020 tercatat 89,98 USD, lebih tinggi dibandingkan nominal pada tahun sebelumnya, namun dari sisi pertumbuhan masih terbilang rendah dari triwulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan *base effect* PMA masih sangat rendah, peningkatan nominal investasi tersebut disumbang oleh Kabupaten Luwu dan Bantaeng. Sementara itu realisasi PMDN pada Kabupaten Luwu tercatat sebesar Rp 23.54 milyar, realisasi tersebut cukup rendah dibandingkan pada tahun sebelumnya. Penurunan tingkat investasi dipengaruhi oleh ketidakpastian global akibat dampak pandemi yang menekan kinerja investasi, sejalan dengan realokasi dan *refocusing* anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi. Di sisi lain, pelaku bisnis cenderung *wait and see* ditengah ketidakpastian yang meningkat.

Selain itu penurunan tingkat investasi juga diakibatkan belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang

penanaman modal, rendahnya infrastruktur pendukung, serta masih kurangnya wirausaha dikalangan generasi muda yang mempengaruhi investasi luar karena investor membutuhkan tenaga yang mempunyai kemampuan berusaha untuk memberikan keyakinan merealisasikan investasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jirang at.al (2014) yang menyatakan bahwa Investasi Swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang artinya bahwa peningkatan atau penurunan investasi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawati Bawinti (2018) menyatakan bahwa investasi swasta tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang disebabkan karena faktor-faktor produksi yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan kurangnya sarana produksi, begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Hukubun at.al (2012).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengeluaran pemerintah Kabupaten Luwu memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu.
2. Investasi swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu. Hal ini menunjukkan bahwa investasi swasta belum mampu memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu.
3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta, dengan melihat nilai R Square sebesar 0,884 yang artinya bahwa 88,4% pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel pengeluaran pemerintah dan investasi swasta sementara 11,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abigael, L. I., Rotinsulu, D. C., & Kawung, G. M. V. (2016). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bitung. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1–10.
- Aminah, S. (2016). Analisis Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(2), 119–130.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. BPS Kabupaten Luwu.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kabupaten Luwu Dalam Angka 2020* (BPS Kabupaten Luwu (ed.)). BPS Kabupaten Luwu.
- Bawinti, I., Kawung, G. M. V., & Luntungan, A. Y. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Talaud. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(04), 23–33.
- Buana, A. L., Juni, H., Saragih, R., Aritonang, S., & Pertahanan, U. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2015. *Jurnal*

Ekonomi Pertahanan, 4, 1–20.

- Danawati, S., Bandesa, I. K. G., & Utama, M. S. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 2123–2160.
- Haryanto, T. P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 148–158.
- Kurniawan, A. I., Militina, T., & Suharto, R. B. (2017). *Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi Effect of Private Investment and Government Spending and Labor To Local Revenue and the Economic Growth*. 13(2), 68–77.
- Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Periode Februari 2021*. (2021). Bank Indonesia.
- Maharani, K., & Isnawati, S. (2014). Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 21(1), 62–72.
- Mokodompit, R., Rumat, V., & Maramis, M. (2013). Pengaruh Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kota Manado Tahun 2003-2012). *Jurnal Berkala Efisiensi*, 73–83.
- Nahumury, L. L. (2019). Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i1.597>
- Pambudy, A. P., & Syairozi, M. I. (2019). Analisis Peran Belanja Modal Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal EKOBIS*, 20(1), 26–39.
- Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kab Luwu Thn 2019-2024*. (n.d.).
- Raharjo, A. (2006). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1982-2003 (Studi Kasus di Kota Semarang)*. 2003.
- Sari, M., Syechalad, M. N., & Majid, S. A. (2016). Pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. *Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(November), 109–115.
- Sitindaon, D. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten demak*. Universitas Negeri Semarang.
- Yuliara, I. M. (2016). *Modul Regresi linier berganda*. Universitas Udayana.